

BAB V

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Penelitian dan Analisis Pemberitaan media pada Presiden Jokowi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Sajian Data, ditemukan bahwa terdapat beberapa berita yang membahas perjalanan politik Jokowi saat mencalonkan diri menjadi calon presiden, lalu pemberitaan mengenai masa-masa awal Jokowi menjadi Presiden Indonesia serta kebijakan-kebijakan baru yang dibuat, dan juga pemberitaan mengenai konflik-konflik internal di kabinet pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai pemberitaan-pemberitaan tersebut dalam kajian komunikasi kepresidenan untuk mengetahui komunikasi kepresidenan yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Jokowi.

5.1.1 Analisa Pemberitaan Media pada Masa Kampanye Pemilu Presiden Jokowi

Mulyana (2013) mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses linier atau suatu sistem. Pendekatan linier berorientasi terhadap efek atau pengaruh pesan politik dan pendekatan sistem berorientasi terhadap kesinambungan suatu sistem politik (Mulyana, 2013). Mulyana (2013) menambahkan bahwa model komunikasi Harold Lasswell, *who says what to whom in which channel with what effect* (dalam Littlejohn, 1996, h. 334) dianggap sebagai salah satu model utama dalam komunikasi politik dan landasan berbagai macam definisi komunikasi politik yang bersifat linier. Adapun unsur-unsur komunikasi politik tersebut terdiri dari komunikator politik, pesan politik, saluran, atau media politik, sasaran atau target politik, dan pengaruh atau efek komunikasi politik (Nimmo, 2011).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, temuan penelitian menunjukkan bahwa Presiden Jokowi menggunakan beberapa unsur komunikasi politik yang diantaranya adalah komunikator politik, pesan politik, dan target politik. Komunikator politik disini mempunyai arti bahwa yang

mengkampanyekan atau yang menyampaikan dari pesan politik tersebut adalah Presiden Jokowi dan dibantu dengan tim pemenangan kampanye yang diketuai oleh Tjahjo Kumolo. Hal tersebut bertujuan agar pesan politik yang disampaikan pada saat kampanye mempunyai efek yang besar terhadap para simpatisansya. Lalu, pesan politik dapat dikaitkan dengan pesan-pesan atau janji-janji kampanye Presiden Jokowi saat melakukan kampanye di kalangan masyarakat. Menurut (Dr Mietzner dalam berita yang dimuat oleh BBC News jakarta Vaswani 2014) pada masa kampanyenya Presiden Jokowi berjanji akan memberantas korupsi dan menghilangkan birokrasi yang rumit pada sistem pemerintahan Indonesia. Lebih lanjut, janji kampanye tersebut telah membuat Presiden Jokowi digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sedangkan target politik Presiden Jokowi dalam masa kampanye tersebut adalah kalangan masyarakat menengah kebawah yang sesuai dengan latar belakang Presiden Jokowi yang bukan merupakan elite politik (Vaswani, 2014).

Terbukti pada masa kampanye tersebut, Jokowi dapat memenangi Pemilihan Presiden melawan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Berdasarkan rekap data yang dilakukan oleh laman berita digital *voaindonesia.com* menyatakan bahwa hasil rekapitulasi suara pemilu presiden 2014 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Jokowi-JK unggul atas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Wardah, 2014). Penghitungan suara yang dikumpulkan di 33 provinsi dan luar negeri menurut Wardah (2014) dalam *voaindonesia.com*, pasangan Jokowi-JK memperoleh suara sebanyak 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Sementara itu, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576,444 suara atau 46,85 persen. Selisih suara keduanya yaitu 8.421.389 suara, dari total suara sah sebanyak 133.574.277 suara. Kemudian Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Husni Kamil Manik menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 (Wardah, 2014).

5.1.2 Analisa Pemberitaan Media pada saat Jokowi Menjabat sebagai Presiden RI

Teori Birokrasi Max Weber sebagaimana dikutip oleh Masmuh (2010) dalam Reksohadirpojo dan Handoko (1982, h. 14-15) bentuk organisasi yang birokratik secara kodratnya adalah bentuk organisasi yang paling efisien. Membentuk suatu organisasi menurut Weber memerlukan masyarakat yang diharapkan dapat membuat organisasi model birokratik dibandingkan dengan organisasi tradisional. Lebih lanjut, model organisasi birokratik memiliki tingkat efisiensi tinggi yang dapat digunakan secara efektif oleh organisasi-organisasi kompleks yang timbul sebagai kebutuhan masyarakat modern (Masmuh, 2010).

Berkaitan dengan penerapan teori birokrasi tersebut, majalah Tempo memberitakan bahwa Presiden Jokowi dengan cepat membuat beberapa rancangan kerja pemerintahan pada masa transisi, diantaranya adalah dengan menyiapkan kabinet menteri yang baru, merancang mekanisme pergantian dan pelantikan posisi gubernur Jakarta yang akan dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama, dan juga merancang tim transisi (Sugiharto, dkk., 2014). Presiden Jokowi membentuk tim transisi untuk menyiapkan rencana kegiatan tersebut. Tim Transisi memiliki tugas dalam membantu kinerja Presiden Jokowi dengan merancang arsitektur kabinet dan kantor kepresidenan, menggalang koalisi partai penyokong pemerintah, menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja negara 2015, serta membantu presiden dalam merancang program-program baru yang akan dijalankan oleh pemerintah (Sugiharto, dkk., 2014).

Selain menyiapkan tim transisi, Presiden Jokowi juga merampingkan struktur lembaga kepresidenan. Dalam perampingan tersebut, lembaga kepresidenan hanya berdiri pada dua pilar yaitu sekretariat negara dan kantor kepresidenan. Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Wakil

Presiden akan bergabung dalam Sekretariat Negara sedangkan UKP4, UP4D, dan para staf khusus melebur ke kantor kepresidenan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembagian kantor tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkuat sistem presidensial yang selama ini dinilai kurang maksimal. Peran presiden sebagai *single chief executor* akan menjadi semakin jelas karena presiden bisa langsung mengeksekusi program, mengawasi menteri, dan memantau kemajuan di lapangan (Sugiharto, dkk., 2014).

Lebih lanjut tentang penerapan teori birokrasi tersebut, Presiden Jokowi juga menuturkan bahwa tidak akan ada kementerian “anak tiri” seperti pada era Presiden Indonesia sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Daerah Tertinggal yang terlihat hanya sebagai pelengkap. Menurut Presiden Jokowi Kementerian Daerah Tertinggal tersebut akan menjadi ujung tombak untuk memajukan daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Mengenai kabinet yang akan dibentuk, Presiden Jokowi akan menamakannya dengan “Kabinet Kerja” dan akan diampu sebagian besar oleh kalangan profesional (Jacobs, 2014)

5.1.3 Keterkaitan antara Penelitian Mengenai *Presidential* di *White House* Amerika Serikat dengan Kepemimpinan Presiden Jokowi

Seperti yang telah dijelaskan oleh Singh & Ansari (2009) pada Bab I bahwa salah satu sarana penunjang tercapainya sistem demokrasi yang baik pemerintah dapat mengimplementasikan *electronic governance* atau *e-governance* yang memiliki program *simple, moral, accountable, responsive, and transparent* (SMART) di dalamnya. Sedangkan fungsi *e-governance* adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta juga menciptakan tatap-muka atau interaksi yang ramah bagi masyarakat (Singh & Ansari, 2009). Maka, peneliti memasukkan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan *presidential communication* ke dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut antara lain yakni penelitian Waldmann (1976) dalam

jurnal yang berjudul *The Domestic Council: Innovation in Presidential Government*, lalu penelitian Owen & Davis (2008) dalam jurnal berjudul *Presidential Communication in the Internet Era*. Kumar (2008) dalam jurnalnya yang berjudul *Conveying Presidential News: The White House Press Corps Covers the President*, lalu Neustadt (2001) dalam jurnalnya yang berjudul *The Weakening White House*, dan penelitian dari Kumar (2002) dalam jurnalnya yang berjudul *Recruiting and Organizing the White House Staf*.

Keterkaitannya penelitian-penelitian tersebut dengan kepemimpinan Presiden Jokowi didahului dengan penelitian yang dilakukan oleh Waldmann (1976) yang meneliti tentang kasus *Watergate* yang terjadi di Amerika Serikat pada awal tahun 1970-an. Penelitian tersebut membahas tentang kelompok *the domestic council* yang dibentuk berdasarkan gagasan dari Presiden Amerika Serikat, Richard Milhous Nixon (Waldmann, 1976). Tujuan dari dibentuknya *The Domestic Council* adalah untuk membantu Presiden dalam mengelola urusan dalam negeri melalui tiga aktivitas utama yaitu, pengembangan rencana-rencana dalam menangani berbagai masalah, memproses rencana tersebut, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada Presiden (Waldmann, 1976). Begitupun dengan apa yang dilakukan dengan Presiden Joko Widodo pada masa saat awal beliau dilantik menjadi Presiden dengan memutuskan untuk membuat tim transisi. Tugas dari tim transisi tersebut adalah membantu kinerja Presiden Jokowi dengan merancang arsitektur kabinet dan kantor kepresidenan, menggalang koalisi partai penyokong pemerintah, menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja negara 2015, serta membantu presiden dalam merancang program-program baru yang akan dijalankan oleh pemerintah (Sugiharto, dkk., 2014).

Lebih lanjut, penelitian Owen & Davis (2008) dalam jurnal berjudul *Presidential Communication in the Internet Era* menjelaskan tentang penggunaan internet di Gedung

Kepresidenan (*White House*) yang menggunakan *website* untuk menyampaikan serta menyebarkan pesan-pesan kepada masyarakat Amerika Serikat. Penggunaan internet pada lingkup kepresidenan Amerika Serikat dimulai pada masa jabatan Presiden Bill Clinton dan George W. Bush (Owen & Davis, 2008). Pada saat itu internet digunakan sebagai media baru dalam menjalankan kebijakan pemerintah di *White House*, Amerika Serikat. *White House* meluncurkan sebuah proyek bernama *Web 2.0*, proyek lanjutan atau pengembangan dari *website* yang berisi komunitas online, jejaring sosial (*social networks*), dan *content sharing sites* (Owen & Davis, 2008).

Penerapan penelitian tersebut pada kepemimpinan Presiden Jokowi dapat terlihat dari penggunaan *official website* serta *social media network* sebagai salah satu sarana penyebaran pesan kepada masyarakat. *Website* dan akun sosial media tersebut dikelola langsung oleh Presiden Jokowi bersama tim media sosial yang berada di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara RI. Keberadaan *website* dan *social media network* dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui kegiatan Presiden Jokowi. Masyarakat dapat mengakses <http://presidenri.go.id> untuk mengetahui aktivitas Presiden Jokowi seperti, *blusukan*, info kementerian, program prioritas dan lain sebagainya. Kegiatan keseharian Presiden Joko Widodo dapat diakses melalui akun *Instagram* Presiden Jokowi, @jokowi. Adapun video kerja dan kunjungan dapat diakses melalui akun *YouTube* 'Presiden Joko Widodo'. Bagi masyarakat yang menggunakan *Facebook* dapat mengunjungi akun 'Presiden Joko Widodo' yang telah aktif sejak 20 Oktober 2014 dan *Twitter* (@jokowi) yang mulai aktif sejak 21 Juni 2015. Selain itu, Sekretariat Kabinet RI juga memiliki akun sosial media yaitu *Facebook* (*Setkab RI*), *YouTube* (*Sekretariat Kabinet RI*), dan *Instagram* (@sekretariat.kabinet) yang dapat memberikan

informasi *up to date* mengenai kegiatan maupun kabar kerja Presiden Jokowi kepada masyarakat.

Kumar (2008) dalam penelitiannya yang berjudul *Conveying Presidential News: The White House Press Corps Covers the President* membahas tentang organisasi-organisasi media massa yang akan mempengaruhi/ membentuk unit pers yang bertugas sebagai pembuat berita tentang *White House* Amerika Serikat. Dalam penelitiannya, Kumar (2008) juga menjelaskan tentang tata cara organisasi media massa dalam mengirimkan wartawannya untuk meliput berita di kawasan *White House* yaitu dengan memilih wartawan yang memiliki lima persyaratan, antara lain wartawan harus bekerja pada organisasi media massa yang tergabung dalam biro Washington, lalu wartawan tersebut harus mempunyai surat jaminan dalam meliput berita di *White House* dari pimpinan biro Washington yang ketiga, wartawan tersebut harus bertempat tinggal di daerah Washington, lalu wartawan tersebut harus mempunyai surat kepercayaan diplomatik dari kongres media massa, dan yang terakhir, wartawan tersebut harus menjalani pemeriksaan data diri oleh *Secret Service* (Kumar, 2008).

Dalam penerapannya pada Kepemimpinan Presiden Jokowi bahwa Istana Negara juga memberlakukan proses seleksi terhadap wartawan yang akan meliput berita di Istana Negara. Hal tersebut ditunjukkan dalam berita yang di unggah oleh Tempo.co melalui wartawan yang bernama Prihandoko (2014) menyebutkan bahwa Biro Pers memutuskan tak memberlakukan tanda pengenal wartawan. Sebagai gantinya, mereka memberikan tanda pengenal harian bagi wartawan dari berbagai media yang ingin meliput kegiatan di Istana. Tanda pengenal harian ini harus diambil di lokasi masuk Istana oleh wartawan dengan membawa surat penugasan dari media masing-masing. Pengambilan tanda pengenal bisa dilakukan mulai pukul 07.00 WIB. Lebih lanjut, Jumlah tanda pengenal harian ini pun dibatasi. Televisi hanya diberi jatah masing-

masing satu tanda pengenal untuk juru kamera dan reporter. Media cetak diberi jatah masing-masing satu untuk juru foto dan reporter. Adapun radio dan media *online* masing-masing satu untuk reporter (Prihandoko, 2014).

Neustadt (2001) dalam jurnalnya yang berjudul *The Weakening White House* membahas tentang tentang melemahnya sistem kepresidenan dari Amerika Serikat lebih dari tiga dekade akhir-akhir ini yang dikarenakan oleh beberapa hal. Neustadt (2001) menjelaskan bahwa terdapat empat alasan yang menyebabkan melemahnya *White House*. Pertama, wewenang atau kekuasaan dari kantor kepresidenan telah dengan sengaja dibuat atau dibentuk. Lalu, keagresifan dari kongres tidak terikat terhadap presiden. Ketiga, kapasitas presiden dalam mendapatkan opini publik telah di kecilkan dan menjadi sangat rumit dalam hal perkembangan media massa. Terakhir, staf kepresidenan dinilai terlalu banyak (Neustadt, 2001).

Berdasarkan pada penelitian tersebut, Presiden Jokowi juga berpendapat bahwa staf kepresidenan di Istana Negara terlalu banyak. Hal tersebut menurut Presiden Jokowi dapat menghambat kinerja para staf dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam membuat kebijakan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Indonesia dan menguatkan sistem presidensial Presiden Jokowi. Hal tersebut diungkapkan pada Majalah Tempo oleh Suigiharto, dkk (2014) Selain menyiapkan tim transisi, Presiden Jokowi juga merampingkan struktur lembaga kepresidenan. Dalam perampingan tersebut, lembaga kepresidenan hanya berdiri pada dua pilar yaitu sekretariat negara dan kantor kepresidenan. Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Wakil Presiden akan bergabung dalam Sekretariat Negara sedangkan UKP4, UP4D, dan para staf khusus melebur ke kantor kepresidenan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembagian kantor tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkuat sistem presidensial yang selama ini dinilai kurang maksimal. Peran presiden sebagai *single chief executor* akan menjadi semakin jelas

karena presiden bisa langsung mengeksekusi program, mengawasi menteri, dan memantau kemajuan di lapangan (Sugiharto, dkk., 2014).

Kumar (2002) dalam penelitiannya yang berjudul *Recruiting and Organizing the White House Staf* membahas tentang bagaimana Gedung Putih merekrut staf dan mengorganisasikan stafnya yang bertujuan untuk memberikan masukan, memberikan bantuan, dan sebagainya kepada presiden Amerika Serikat. Kumar (2002) juga menjelaskan bahwa staf yang direkrut harus mempunyai kriteria dan pengetahuan di bidang politik secara professional (Kumar, 2002).

Dalam penerapan penelitian tersebut Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa dalam merekrut calon menteri pada kabinetnya, Presiden Jokowi melibatkan lembaga Komisi Anti Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses perekrutan para menteri. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa dalam merekrut calon menteri sebagian besar akan diisi oleh kalangan ahli atau kalangan professional dan tidak sepenuhnya diisi oleh politikus. Hal tersebut diungkapkan dalam majalah Tempo oleh Septian, dkk (2014) yang mengatakan bahwa Mengenai kabinet yang akan dibentuk, Presiden Jokowi akan menamakannya dengan “Kabinet Kerja” dan akan diampu sebagian besar oleh kalangan professional (Jacobs, 2014). Lebih lanjut, Sugiharto, dkk (2014) dalam Majalah Tempo memaparkan alasan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam meminta bantuan Lembaga Komisi Anti Korupsi (KPK) dan Lembaga Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena menginginkan para calon menteri yang bersih, professional serta juga mempunyai kredibilitas yang tinggi. Hal tersebut bertujuan agar iklim dan budaya organisasi di kabinet kerja tetap terjaga dan kondusif.

5.1.4 Konflik pada Kepemimpinan Presiden Jokowi

Seperti yang telah dijelaskan pada bab dua tentang komunikasi organisasi dalam pemerintahan, Masmuh (2010) berpendapat bahwa komunikasi dalam organisasi turut berpartisipasi dalam membangun iklim organisasi dan membangun budaya organisasi. Komunikasi organisasi juga menjadi sistem aliran yang menghubungkan dan membangkitkan kinerja antar bagian dalam organisasi sehingga menghasilkan energi. Lebih lanjut, jika hal diatas dapat dengan sukses diterapkan maka perbedaan-perbedaan individu dan kesalahpahaman dalam suatu organisasi dapat dikurangi dan konflik dapat dihindari (Masmuh, 2010).

Berkaitan dengan penjelasan diatas, terdapat beberapa konflik yang terjadi pada kepemimpinan Presiden Jokowi dan dapat ditanggulangi dengan baik oleh Presiden Jokowi. Beberapa konflik yang terjadi adalah perombakan struktur kabinet, campur tangan Megawati Soekarno Putri yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam mencampuri keputusan Presiden Jokowi saat akan memilih malon menteri di kabinet, serta juga beberapa kasus pergantian menteri di kabinet. Konflik pada perombakan struktur kabinet terjadi karena Wakil Presiden Jusuf Kalla berbeda pendapat pada masalah perampingan kabinet. Menurut Sugiharto, dkk (2014) tim transisi berencana merubah struktur kabinet dengan hanya memasukkan 27 kursi dari format sebelumnya yaitu 34 kursi. Tetapi, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak sependapat dengan ide tim transisi karena menurut Jusuf Kalla Indonesia sangat luas wilayahnya jika hanya diampu oleh sedikit kementrian (Sugiharto, dkk., 2014). Sedangkan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kantor kepresidenan harus berisi dengan orang-orang yang dapat bergerak cepat mengikuti gerak presiden agar segala keputusan dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien seperti halnya penerapan pada konsep komunikasi organisasi yang diungkapkan oleh Masmuh (2010).

Konflik selanjutnya adalah suatu intervensi yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia. Partai tersebut juga menaungi Jokowi saat menyalonkan diri di Pemilihan Presiden pada tahun 2014 lalu. Konflik tersebut bermula saat Megawati Soekarno Putri mempertanyakan langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan membutuhkan bantuan Komisi Anti Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar menelusur rekam jejak para calon Menteri (Sugiharto, dkk., 2014). Kemudian, dalam menyelesaikan konflik tersebut, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa mereka hanya menginginkan para calon menteri yang bersih, professional serta juga mempunyai kredibilitas yang tinggi. Hal tersebut bertujuan agar iklim dan budaya organisasi di kabinet kerja tetap terjaga dan kondusif (Sugiharto, dkk., 2014).

Penerapan lainnya pada konsep komunikasi organisasi yang bertujuan untuk menciptakan iklim dan budaya organisasi dengan baik pada era kepemimpinan Presiden Jokowi adalah dengan melakukan perombakan menteri-menteri kabinet. Perombakan tersebut juga bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi antara pucuk pimpinan negara yakni Presiden Jokowi dengan para menterinya. Menteri-menteri yang terkena dampak perombakan tersebut telah diganti dengan para professional yang mempunyai kemampuan mumpuni di bidangnya (Sugiharto, dkk., 2014)..

5.2 Pencapaian Dua Tahun Masa Kerja Presiden Jokowi

Menurut Geovanie (2017) setiap presiden memiliki karakter dan cerita kesuksesannya sendiri. Presiden Soekarno mendapat julukan Bapak Proklamasi, Presiden Soeharto mendapat julukan Bapak Pembangunan Indonesia, dan Presiden Abdurrahman Wahid (GusDur) dikenal dengan Bapak Bhineka Indonesia (Geovanie, 2017). Presiden Jokowi mendapat julukan Bapak Infrastruktur Indonesia, karena pembangunan jalan dan infrastruktur yang terus dijalankan

(Geovanie, 2017). Sebagai contoh, pembuatan jalan tol trans Sumatera tahap 1 dari Lampung-Palembang-Indralaya, pembangunan jalan LRT jurusan Cibubur-Cawang-Bekasi Timur-Cawang, pembangunan infrastruktur perbatasan Kalimantan dari Kalimantan Utara sampai dengan Kalimantan Barat, dan lain sebagainya (Geovanie, 2017).

Presiden Jokowi juga menerapkan kebijakan deregulasi sebagai prasyarat untuk menarik investasi. Setelah seluruh proyek pembangunan infrastruktur sudah rampung, atau sudah berjalan minimal setengahnya, tentu dampaknya akan sangat signifikan bagi peningkatan investasi dan penyediaan stok pangan dalam negeri (Geovanie, 2017). Pembangunan infrastruktur dilakukan Presiden Jokowi untuk meningkatkan perekonomian negara (Geovanie, 2017). Presiden Jokowi juga meluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) dan Reforma Agraria. Kegigihan dalam membangun infrastruktur Indonesia menjadikan Presiden Jokowi satu-satunya presiden yang dalam dua tahun pemerintahannya telah membangun infrastruktur dari Sabang hingga Merauke, *blusukan* ke pelosok daerah Indonesia, dan mewujudkan reforma agrarian untuk menggerakkan ekonomi petani dan masyarakat adat melalui pembagian lahan (Geovanie, 2017).

Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi juga telah membuat kebijakan mengenai pajak. Pajak komponen paling signifikan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang menjadi syarat mutlak terlaksananya pembangunan (Geovanie, 2017). Selain meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) seperti pemanfaatan sumber daya alam, tarif, penyewaan barang/ kekayaan negara, Presiden Jokowi juga meningkatkan perolehan pajak (Geovanie, 2017). Kebijakan yang diambil Presiden Jokowi mirip dengan kebijakan Ronald Reagan Presiden Amerika Serikat pada tahun 1981 dengan melakukan pemotongan dan pengampunan pajak di Amerika Serikat (Geovanie, 2017). Pemotongan dan pengampunan pajak (*tax amnesty*) menjadi salah satu langkah penting yang ditempuh Jokowi

untuk meningkatkan penerimaan pemerintah (yang ditargetkan mencapai hingga Rp. 165.000.000.000.000) (Geovanie, 2017).

5.3 Iklim Organisasi Pemerintahan pada era Presiden Jokowi

Menurut Geovanie (2017, h. 96-97) menyebutkan bahwa lima kriteria anggota kabinet pada pemerintahan Presiden Jokowi, antara lain:

- Pertama, memiliki rekam jejak (*track record*) yang baik, tidak pernah terjerat kasus korupsi, atau pelanggaran hukum lain yang mencemarkan namanya.
- Kedua, punya integritas moral yang baik, punya komitmen yang kuat untuk tetap menjaga nama baik dan ikut mendukung setiap upaya pemberantasan mafia, terutama yang terkait dengan kementerian yang dipimpinnya.
- Ketiga, memiliki loyalitas yang utuh pada negara. Bekerja semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara.
- Keempat, memiliki pemahaman dan keahlian teknis di bidang kementerian yang dipimpinnya.
- Kelima, professional. Kriteria ini merupakan gabungan antara kecakapan teknis dan kedewasaan sikap.

Presiden Jokowi juga memberikan target-target pencapaian kinerja secara berkala. Menurut Geovanie (2017, h. 98) arget-target tersebut akan menjadi tolok ukur apakah kriteria yang diterapkan bisa terbukti atau tidak. Jika tidak terbukti dalam arti gagal memenuhi target, harus siap mengundurkan diri atau diberhentikan agar bisa secepatnya diganti orang lain yang lebih mampu bekerja sesuai target (Geovanie, 2017).

Ada beberapa kelebihan yang dimiliki anggota kabinet pimpinan Presiden Jokowi diantaranya adalah, tidak didasarkan pada transaksi politik (meskipun diragukan karena banyak

menteri-menteri berasal dari partai politik) (Geovanie, 2017). Presiden Jokowi membuktikan tidak adanya transaksi politik dengan pemberian kebebasan oleh Presiden Jokowi terhadap pimpinan partai politik untuk mengajukan siapa pun kader-kadernya yang dianggap layak menjadi menteri sesuai jumlah jatah kursi yang diberikan pada setiap partai politik (Geovanie, 2017).

Kelebihan yang kedua adalah Presiden Jokowi melibatkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi calon menteri tersebut dengan bertujuan agar meminimalisir calon menteri yang memiliki rekam jejak yang kurang bagus (Geovanie, 2017). Selain itu, tidak adanya rangkap jabatan dengan pimpinan partai politik atau jabatan-jabatan lainnya. Menurut Geovanie (2017) kelebihan tersebut mempunyai makna penting bukan hanya sekadar untuk meminimalisasi konflik kepentingan (*conflict of interest*) tetapi juga untuk “memaksa” para menteri untuk bekerja secara maksimal. Kelebihan yang dimiliki oleh kabinet Jokowi ini akan sangat berpengaruh secara positif untuk menumbuhkan optimisme publik dan untuk memacu keberhasilan pemerintahan (Geovanie, 2017).